



Policy Making Process yang Mencakup Policy Issue and Agenda Setting

1Zulmi Aryani, 2Eldawaty, 3Yuliani Fitri, 4Rusdinal, 5Nurhizrah Gistituati
aryanizulmi@gmail.com eldawaty@fik.unp.ac.id yulianifitri020784@gmail.com rusdinal@fip.unp.ac.id
gistituatinurhizrah@gmail.com

Doctoral Program of educational science, Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia,
STKIP Widyaswara Indonesia, Pendidikan Olahraga Universitas Negeri Padang, Universitas Ekasakti Padang

Date of Submission: 13-06-2024

Date of Acceptance: 27-06-2024

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kajian terkait policy making process. Metode yang digunakan adalah kualitatif yang diperoleh dari beberapa studi literatur seperti artikel dan media media lainnya. Hasil yang diperoleh dapat dilihat bahwa berikut adalah beberapa aspek yang penting dalam komunikasi kebijakan pendidikan yaitu klaritas dan keterbacaan, Melibatkan Pemangku Kepentingan, Media Massa dan Komunikasi Digital, Transparansi dan Keterbukaan, Pendidikan dan Penyuluhan, Evaluasi dan Pemantauan.

Kata Kunci: Policy Making, Policy Issue, Agenda Setting

Pendahuluan

Policy-making process adalah serangkaian langkah yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga kebijakan publik untuk mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan publik. Dalam proses ini, ada beberapa tahapan yang biasanya dilalui, termasuk policy issue identification, agenda setting, pembuatan kebijakan, implementasi, dan evaluasi.

Isu kebijakan menurut ahli dapat dijelaskan sebagai masalah atau topik yang membutuhkan perhatian dan intervensi dari pemerintah atau pembuat kebijakan. Ahli kebijakan sering kali mengidentifikasi isu-isu kebijakan berdasarkan dampaknya terhadap masyarakat, kepentingan publik, atau tantangan yang dihadapi oleh suatu negara atau organisasi.

Ahli kebijakan Sabatier dan Weible dalam buku "Theories of the Policy Process" mengemukakan bahwa isu kebijakan adalah masalah yang menjadi fokus perhatian pembuat kebijakan dan masyarakat. Isu kebijakan ini dapat muncul karena adanya perbedaan pendapat, konflik kepentingan, atau kebutuhan untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi.

Ahli kebijakan Michael Howlett dalam bukunya "Designing Public Policies: Principles and Instruments" menggambarkan isu kebijakan sebagai masalah yang memerlukan perhatian dan tindakan kebijakan untuk diatasi. Howlett menekankan pentingnya pemahaman mendalam tentang isu-isu kebijakan untuk merancang kebijakan yang efektif.

Policy issue identification adalah tahap awal dalam proses pembuatan kebijakan. Pada tahap ini, isu-isu kebijakan yang perlu diatasi atau diperbaiki diidentifikasi. Isu-isu kebijakan ini dapat muncul dari berbagai sumber, seperti masalah masyarakat, permintaan politik, hasil penelitian, atau tuntutan kebijakan dari kelompok kepentingan.

Metode

Metode yang digunakan adalah kualitatif yang diperoleh dari beberapa studi literatur seperti artikel dan media media lainnya. Setelah dikumpulkan beberapa referensi lalu didiskripsikan menjadi sebuah tulisan berkaitan dengan isu kebijakan.

Hasil dan Pembahasan

Isu Kebijakan (Policy Issues)

Issue kebijakan muncul karena telah terjadi konflik atau "perbedaan persepsional" diantara para aktor atau suatu situasi problematik yang dihadapi oleh masyarakat pada suatu waktu tertentu, Issue kebijakan bersifat subyektif, karena dipengaruhi persepsi, Adanya persepsi mempengaruhi status peringkat dari suatu issue kebijakan.

Menurut Dunn (2003) Issue kebijakan merupakan "produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu". Issue kebijakan (policy issues) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (policy



problem). Policy issues lazimnya muncul karena telah terjadi silang pendapat diantara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan itu sendiri. Sedangkan pendapat Hogwood & Gunn (1986) Issue bukan hanya mengandung makna adanya masalah atau ancaman, tetapi juga peluang-peluang bagi tindakan positif tertentu dan kecenderungan-kecenderungan yang dipersepsikan memiliki nilai potensial yang signifikan.

Dapat disimpulkan bahwa Policy issue identification adalah tahap awal dalam proses pembuatan kebijakan. Pada tahap ini, isu-isu kebijakan yang perlu diatasi atau diperbaiki diidentifikasi. Isu-isu kebijakan ini dapat muncul dari berbagai sumber, seperti masalah masyarakat, permintaan politik, hasil penelitian, atau tuntutan kebijakan dari kelompok kepentingan.

Karakteristik penting untuk mengenali adanya masalah kebijakan

Menyangkut kepentingan masyarakat luas, Serious, situasi tersebut berada di atas ambang toleransi untuk diabaikan begitu saja, Potensial menjadi serius, mungkin utk saat ini suatu situasi belum berkembang cukup serius, tetapi dlm jangka panjang akan menjadi sangat serius, Ada peluang utk memperbaiki, tidak semua situasi problematis layak menjadi masalah kebijakan jika dari sudut teknis, ekonomis, politis dan administratif tdk mungkin dipecahkan melalui kebijakan.

Dari segi peringkat, issue kebijakan dapat dibagi menjadi 4 kategori besar

Issue Utama : masalah besar yang berada pada tingkat paling tinggi

Issue Sekunder : masalah yang merupakan dari terjemahan masalah besar yang mencakup penetapan program, kelompok sasaran, dan pihak-pihak lain yang memperoleh keuntungan dari program tersebut

Issue Fungsional : yakni masalah yang menyangkut anggaran, pengadaan bahan dan sebagainya

Issue Minor : masalah yang berkenaan dengan dengan aspek-aspek, seperti ketenagakerjaan yang menangani program.

Agenda Setting

Agenda setting adalah proses yang melibatkan pemilihan dan penentuan isu-isu tertentu yang akan diberikan perhatian dan dibahas oleh media massa, publik, dan pembuat kebijakan. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Maxwell McCombs dan Donald Shaw pada tahun 1972. Donald Shaw adalah seorang profesor

komunikasi yang bekerja sama dengan Maxwell McCombs dalam mengembangkan teori agenda setting. Karya mereka, seperti "The Agenda-Setting Function of Mass Media", hal ini memberikan dasar pemahaman tentang bagaimana media massa mempengaruhi perhatian publik terhadap isu-isu tertentu.

Agenda setting berfokus pada pengaruh media massa dalam menentukan perhatian publik terhadap isu-isu tertentu. Media massa memiliki kekuatan untuk memilih, mengangkat, dan memberikan sorotan pada isu-isu tertentu, sementara mengabaikan isu-isu lainnya. Dalam proses ini, media massa mempengaruhi apa yang menjadi topik pembicaraan dan perhatian publik.

Agenda-setting merupakan proses bagaimana masalah-masalah publik dan alternatif solusinya menarik perhatian atau justru diabaikan publik, elite politik, dan pemerintahan (Birkland, 2007). Agenda setting merupakan kegiatan membuat masalah publik menjadi masalah kebijakan. Menurut Jones (1973), agenda diartikan sebagai istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu isu yang dinilai oleh publik perlu diambil suatu tindakan.

Bernard Cohen adalah seorang ahli komunikasi dan ilmu politik yang juga berkontribusi dalam pengembangan teori agenda setting. Dalam karya-karyanya, Cohen menyoroti pentingnya peran media massa dalam menentukan isu-isu yang dianggap penting oleh publik dan mempengaruhi pandangan mereka.

Proses agenda setting terjadi dalam dua tahap.

Tahap pertama adalah agenda setting media, di mana media massa memilih isu-isu yang akan diberitakan dan diberikan perhatian yang tinggi. Dalam hal ini, media mempengaruhi agenda publik dengan menentukan topik yang dianggap penting.

Tahap kedua adalah agenda setting publik, di mana perhatian publik dipengaruhi oleh isu-isu yang diberitakan oleh media massa. Melalui pemberitaan yang intensif dan repetitif, media massa dapat mempengaruhi persepsi dan prioritas isu-isu yang dianggap penting oleh publik.

Agenda setting memiliki implikasi penting dalam proses pembuatan kebijakan. Isu-isu yang mendapatkan perhatian yang tinggi dari media massa dan publik cenderung menjadi prioritas dalam agenda kebijakan. Hal ini dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan dengan mendorong pembuat kebijakan untuk menangani isu-isu yang sedang populer dan mendapat sorotan luas.



Policy Formulation

Policy formulation (perumusan kebijakan) adalah proses pembuatan kebijakan publik yang melibatkan identifikasi, analisis, pemilihan, dan pengembangan opsi kebijakan untuk mengatasi isu atau masalah yang dihadapi oleh pemerintah atau organisasi. Langkah-langkah dalam policy formulation meliputi:

Identifikasi Masalah, Tahap awal dalam policy formulation adalah mengidentifikasi masalah atau isu yang memerlukan perhatian kebijakan. Masalah tersebut dapat berasal dari berbagai sumber, seperti kebutuhan masyarakat, perubahan sosial, tantangan ekonomi, atau perubahan kebijakan sebelumnya yang tidak efektif.

Analisis Kebijakan, Setelah masalah diidentifikasi, tahap berikutnya adalah melakukan analisis kebijakan. Ini melibatkan pengumpulan data, penelitian, evaluasi dampak kebijakan yang ada, dan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi masalah tersebut. Analisis kebijakan membantu mengidentifikasi akar penyebab masalah dan mencari solusi yang tepat.

Pengembangan Opsi Kebijakan, Berdasarkan hasil analisis, langkah selanjutnya adalah mengembangkan opsi kebijakan yang mungkin untuk mengatasi masalah tersebut. Opsi-opsi ini dapat berupa kebijakan baru, modifikasi kebijakan yang ada, atau kombinasi dari keduanya. Pengembangan opsi kebijakan melibatkan penilaian terhadap kekuatan, kelemahan, dan implikasi dari setiap opsi yang diusulkan.

Evaluasi Opsi Kebijakan, Setelah opsi kebijakan dikembangkan, tahap evaluasi dilakukan untuk menilai keefektifan, efisiensi, dan dampak sosial, ekonomi, dan politik dari masing-masing opsi tersebut. Evaluasi ini melibatkan analisis risiko, konsultasi dengan para pemangku kepentingan, dan perhitungan biaya dan manfaat dari setiap opsi kebijakan.

Pemilihan Kebijakan, Setelah evaluasi, tahap selanjutnya adalah pemilihan kebijakan yang akan diimplementasikan. Pemilihan ini didasarkan pada pertimbangan analisis, evaluasi, dan ketersediaan sumber daya yang diperlukan. Pemilihan kebijakan juga melibatkan faktor politik, kepentingan pemangku kepentingan, dan pertimbangan etika.

Implementasi Kebijakan, Setelah kebijakan dipilih, tahap implementasi dimulai. Implementasi melibatkan penyusunan rencana tindakan, alokasi sumber daya, pembentukan kelembagaan, dan pelaksanaan kebijakan tersebut. Selama tahap ini, pemangku kepentingan yang

relevan terlibat dalam menjalankan kebijakan dan memantau kemajuan implementasinya.

Dalam tataran konseptual perumusan kebijakan tidak hanya berisi cetusan pikiran atau pendapat para pemimpin yang mewakili anggota, tetapi juga berisi opini publik (publik opinion) dan suara publik (publik voice), seperti dijelaskan oleh Parson (1997). Hal ini disebabkan oleh proses pembuatan kebijakan pada esensinya tidak pernah bebas nilai (value free) sehingga berbagai kepentingan akan selalu mempengaruhi proses pembuatan kebijakan.

Aktor-aktor yang terlibat dalam proses formulasi tersebut, menurut Peters (1985) terbagi dalam: a. Birokrasi publik merupakan aktor yang menonjol perannya dalam setiap proses formulasi kebijakan karena birokrasi mempunyai pengalaman yang paling banyak dalam prosedur formulasi kebijakan. b. Tangki-tangki pemikir dan kabinet bayangan yang berada disekitar birokrasi merupakan alternatif lain sebagai formulator kebijakan publik diluar birokrasi pemerintah, karena bisa disebabkan oleh keparannya. c. Kelompok kepentingan (interest groups) dengan memberikan tekanan kepada pemerintah agar suatu masalah dapat masuk dalam agenda pemerintah dan berlanjut pada proses formulasi kebijakan. d. Anggota dewan secara individual juga merupakan salah satu aktor yang cukup berperan dalam proses formulasi kebijakan.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab gagal suatu masalah atau "isu" menjadi agenda kebijakan, termasuk kebijakan pendidikan adalah: a. Terdapatnya kelompok penekan dan penghambat baik yang bersumber dari kelompok etnik, sekte dan kelompok-kelompok primordial. b. Jika suatu masalah atau "isu-isu" tersebut jika diagendakan, bisa bertentangan dengan tata nilai dan tata norma yang sedang berlaku atau dijunjung tinggi masyarakat. c. Jika masalah atau "isu-isu" tersebut diagendakan, dikhawatirkan dapat mengancam kedudukan dan kepentingan pemerintah yang sedang berkuasa.

Policy Legitimation (Legitimasi Kebijakan)

Policy legitimation (legitimasi kebijakan) adalah proses yang melibatkan pengakuan dan penerimaan kebijakan oleh masyarakat atau pemangku kepentingan yang terkena dampak. Legitimasi kebijakan merupakan upaya untuk memperoleh dukungan, persetujuan, dan kepercayaan publik terhadap kebijakan yang diusulkan atau diterapkan oleh pemerintah atau organisasi.



Legitimasi sangat penting karena akan membawa pengaruh terhadap masyarakat banyak, baik yang menguntungkan bagi sebagian masyarakat maupun yang membawa dampak yang merugikan kelompok lain. Selain itu setiap kebijakan juga membawa implikasi terhadap anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah. Pada umumnya wewenang melakukan legitimasi dimiliki oleh pemerintah atau badan legislatif. Namun kalau dikaji lebih mendalam, bahwa proses legitimasi tersebut tidak dapat dipisahkan dari hubungan antara negara dan rakyat sebagai sumber legitimasi yang paling utama, sebab ukuran legitimasi yang dimiliki oleh pemerintah sangat tergantung pada tersedianya dukungan bagi pemerintah dan apa yang ingin diperoleh dari masyarakat.

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah.

Dalam konteks legitimasi kebijakan, beberapa hal yang penting untuk dipertimbangkan adalah:

Kepatuhan Terhadap Prinsip Demokrasi, Dalam sistem demokrasi, legitimasi kebijakan sering kali dikaitkan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam distribusi kebijakan. Keterlibatan publik dan pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan dapat meningkatkan legitimasi kebijakan tersebut.

Justifikasi Rasional, Kebijakan yang memiliki dasar rasional dan logis mendapatkan lebih banyak dukungan dan legitimasi. Justifikasi yang jelas dan komunikasi yang efektif tentang tujuan dan manfaat kebijakan kepada masyarakat dapat membantu memperoleh dukungan dan pemahaman yang lebih luas.

Keadilan dan Kesetaraan, Kebijakan yang dianggap adil dan menghormati hak asasi manusia mendapatkan lebih banyak legitimasi. Pemenuhan kebutuhan dan kepentingan berbagai kelompok masyarakat serta penanganan ketimpangan sosial dapat memperkuat legitimasi kebijakan tersebut.

Akuntabilitas dan Transparansi, Keterbukaan tentang proses perumusan kebijakan, penggunaan sumber daya, dan hasil kebijakan merupakan faktor penting dalam memperoleh legitimasi. Masyarakat perlu merasa bahwa mereka dapat memengaruhi kebijakan dan bahwa pemerintah atau organisasi bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka.

Hasil dan Dampak Kebijakan, Kebijakan yang menghasilkan dampak yang positif dan diakui oleh

masyarakat atau pemangku kepentingan memiliki lebih banyak legitimasi. Evaluasi yang obyektif terhadap kebijakan dan komunikasi yang terbuka tentang pencapaian tujuan dan dampak kebijakan dapat mempengaruhi persepsi publik tentang legitimasi kebijakan tersebut.

Terdapat beberapa tipe legitimasi yang umum digunakan pemerintah dalam melegitimasi suatu kebijakan sebagai berikut: a). Legitimasi oleh lembaga legislatif sebagai perwujudan dari rakyat, sebagai pemegang legitimasi tertinggi dalam kehidupan bernegara, b). Peraturan dan prosedur administrasi, dengan memberlakukan peraturan tertentu yang ditetapkan pemerintah, c). Lembaga peradilan dengan maksud untuk melindungi warga negara yang berupa ketetapan hukum, d). Legitimasi oleh masyarakat dengan melalui proses secara langsung seperti referendum.

Policy Communication or Socialization (Komunikasi atau Sosialisasi Kebijakan)

Komunikasi kebijakan pendidikan adalah proses menyampaikan informasi, tujuan, dan implikasi kebijakan pendidikan kepada berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat umum, peserta didik, guru, orang tua, lembaga pendidikan, dan pihak terkait lainnya. Tujuan dari komunikasi kebijakan pendidikan adalah untuk memastikan pemahaman yang luas, partisipasi yang aktif, dan dukungan yang solid terhadap kebijakan yang diusulkan atau diterapkan.

Komunikasi kebijakan merupakan suatu komunikasi yang terjadi di dalam tubuh pemerintahan, sehingga dapat diterjemahkan merupakan suatu penyampaian pesan, program dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan Negara.

Hakikat dari komunikasi kebijakan pendidikan adalah sosialisasi atas rumusan-rumusan kebijakan pendidikan yang sudah dilegitimasikan. Sebagai komunikatornya adalah para aktor perumusan kebijakan pendidikan, sedangkan sebagai komunikannya adalah para pelaksana kebijakan pendidikan beserta dengan perangkat dan khalayak pada umumnya.

Berikut adalah beberapa aspek yang penting dalam komunikasi atau sosialisasi kebijakan:

Identifikasi Pemangku Kepentingan, Langkah pertama dalam komunikasi atau sosialisasi kebijakan adalah mengidentifikasi pemangku kepentingan yang relevan. Ini termasuk individu, kelompok masyarakat, organisasi, dan lembaga yang akan terpengaruh oleh kebijakan atau memiliki minat dalam isu tersebut. Melibatkan pemangku kepentingan secara langsung membantu



memastikan bahwa pesan kebijakan mencapai target yang tepat.

Pesan yang Jelas dan Relevan, Pesan kebijakan yang disampaikan harus jelas, terfokus, dan relevan dengan konteks dan kebutuhan pemangku kepentingan. Bahasa yang digunakan harus dipahami oleh audiens yang dituju, menghindari jargon teknis atau istilah yang rumit. Penting untuk menekankan manfaat dan tujuan kebijakan secara konkret dan mengkomunikasikan implikasi yang mungkin terjadi.

Saluran Komunikasi yang Efektif, Memilih saluran komunikasi yang tepat adalah kunci dalam menyampaikan pesan kebijakan. Ini dapat mencakup pertemuan tatap muka, forum diskusi, media massa (misalnya, televisi, radio, surat kabar), media sosial, situs web, atau publikasi cetak. Memilih saluran yang paling relevan dan efektif untuk menghubungkan pemangku kepentingan akan membantu meningkatkan jangkauan dan dampak komunikasi.

Keterlibatan Interaktif, Komunikasi atau sosialisasi kebijakan yang efektif melibatkan pemangku kepentingan dalam proses dialog dan interaksi. Ini mencakup mendengarkan masukan, menjawab pertanyaan, dan memberikan kesempatan bagi pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam diskusi dan pengambilan keputusan. Keterlibatan interaktif membangun kepercayaan, membantu memahami perspektif yang berbeda,

Komunikasi atau sosialisasi kebijakan merujuk pada proses menyebarkan informasi, mempromosikan pemahaman, dan memperoleh dukungan untuk kebijakan yang diusulkan atau diterapkan. Tujuan dari komunikasi atau sosialisasi kebijakan adalah untuk memastikan bahwa pemangku kepentingan terlibat dalam proses pengambilan keputusan, memahami tujuan dan implikasi kebijakan, serta mendukung implementasinya.

Berikut adalah beberapa aspek yang penting dalam komunikasi kebijakan pendidikan:

Klaritas dan Keterbacaan, Pesan kebijakan pendidikan harus jelas, terstruktur, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan masyarakat. Hindari penggunaan jargon teknis atau istilah yang rumit yang mungkin sulit dipahami oleh orang awam. Gunakan bahasa yang sederhana dan jelaskan konsep-konsep yang kompleks secara terperinci.

Melibatkan Pemangku Kepentingan, Melibatkan pemangku kepentingan seperti guru, orang tua, siswa, dan lembaga pendidikan dalam proses komunikasi kebijakan pendidikan sangat penting. Dengan mendengarkan masukan mereka,

menjawab pertanyaan, dan menerima umpan balik, kebijakan pendidikan dapat menjadi lebih relevan dan dapat diterima oleh masyarakat.

Media Massa dan Komunikasi Digital, Media massa, seperti televisi, radio, dan surat kabar, tetap menjadi saluran penting dalam komunikasi kebijakan pendidikan. Di era digital, platform seperti situs web, media sosial, dan aplikasi pesan juga menjadi sarana yang efektif untuk menyebarkan informasi dan memfasilitasi dialog dengan masyarakat. Pemanfaatan media massa tradisional dan komunikasi digital dapat mencapai audiens yang lebih luas dan beragam.

Transparansi dan Keterbukaan, Penting untuk menjaga transparansi dalam komunikasi kebijakan pendidikan. Masyarakat perlu mengetahui alasan di balik kebijakan, proses pengambilan keputusan, serta dampak yang mungkin timbul. Memberikan akses terbuka terhadap dokumen kebijakan, data pendukung, dan informasi yang relevan akan membantu membangun kepercayaan dan partisipasi yang lebih baik.

Pendidikan dan Penyuluhan, Selain menyampaikan informasi, komunikasi kebijakan pendidikan juga harus melibatkan elemen pendidikan dan penyuluhan. Ini dapat dilakukan melalui penyediaan materi edukatif, pelatihan, seminar, atau lokakarya untuk memastikan pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan, dampaknya, serta cara implementasinya. Pendidikan dan penyuluhan ini memainkan peran penting dalam mempersiapkan masyarakat untuk perubahan dan memastikan kesuksesan kebijakan pendidikan.

Evaluasi dan Pemantauan, Komunikasi kebijakan pendidikan tidak hanya terjadi pada tahap perumusan kebijakan, tetapi juga harus berlanjut selama implementasi dan evaluasi kebijakan. Memberikan pembaruan secara berkala kepada masyarakat tentang perkembangan dan pencapaian kebijakan pendidikan serta melibatkan mereka dalam proses evaluasi dapat membangun akuntabilitas dan memperbaiki kebijakan yang ada.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah diuraikan dapat disimpulkan bahwa beberapa aspek yang penting dalam komunikasi kebijakan pendidikan yaitu klaritas dan keterbacaan, Melibatkan Pemangku Kepentingan, Media Massa dan Komunikasi Digital, Transparansi dan Keterbukaan, Pendidikan dan Penyuluhan, Evaluasi dan Pemantauan. Identifikasi isu kebijakan dan penetapan agenda merupakan dua tahapan fundamental dalam proses pembuatan kebijakan publik. Kedua tahapan ini saling terkait dan



memengaruhi satu sama lain, serta melibatkan berbagai faktor kompleks. Pemahaman yang mendalam tentang dinamika dalam kedua tahapan ini dapat membantu pembuat kebijakan mengelola proses pembuatan kebijakan secara lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Referensi

- [1]. Customs Union update will serve to this difficult task for Türkiye and show the way for the others. References 1. Dreyer, L.: Trade Policy in the EU's Neighbourhood. Notre Europe, 2012. https://institutdelors.eu/wp-content/uploads/2020/08/i.dreyer_trade_policy_in_eu_neighbourhood_ne_may2012-1.pdf, last accessed 2021/10/29.2.
- [2]. Anderson, James E. 2003. Public Policy Making: An Introduction. Boston: Houghton Mifflin Company.
- [3]. Dunn, William N. 1999, Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Gadjah Mada
- [4]. European Sources Online (ESO), Information Guide Trade Policy. Cardiff University Press, Cardiff, 2013.
- [5]. European Commission, DG Trade Statistical Guide, Brussel, 2018.4. European Commission, EU Global Strategy, Brussel, 2020. <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13202-2016-INIT/en/pdf>, last accessed 2021/10/29.
- [6]. European Commission, Strategic Plan 2020-2024. Brussel, 2020. https://ec.europa.eu/info/system/files/trade_sp_2020_2024_en.pdf, last accessed 2021/10/29.
- [7]. Hoekman, B. and Puccio, L. EU Trade Policy: Challenges and Opportunities. RSCAS PP 2019/06.
- [8]. Parson, Wayne, 1997. Public Policy: An Introduction to The Theory and Practice of Policy analysis, buku 2. Edward Elgar, UK
- [9]. Robert Schuman Centre for Advanced Studies, Italy, 20197.
- [10]. Hwee, Y. L.: Ten Years of ASEM – Changes and Challenges. In S. Bersick, W. Stüchhof, P. Welde (Eds), Multiregionalism and Multilateralism. pp 141-156. Amsterdam University Press, Amsterdam, 2006.
- [11]. Katunar, M., Maljak, M., Martinić, S. The Evolution of the EU's Foreign Trade Policy. Pravnika, 48, 1 (96), pp 123-142, Zagreb, 2014.
- [12]. Kim, M. H. and Caporaso, J. Globalisation: Trend, Limits, and Controversies. In Telo, M. (Ed.). Globalisation, Multilateralism, Europe: Towards a Better Governance?: Routledge, New York, 2014.
- [13]. Leblond, P. And Miljusevic, C. V. EU Trade Policy in the Twentyfirst Century: Change, Continuity and Challenges, Journal of European Public Policy, 26: 12, pp.1836-1846, 2019.
- [14]. OECD, The European Union's Trade Policies and Their Economic Effects, 2000.
- [15]. Renard, T. Partnerships for Effective Multilateralism? Assessing the Compatibility Between EU Bilateralism, (inter-)Regionalism and Multilateralism. Cambridge Review of International Affairs, 29: 1, pp. 18-35, Cambridge, 2015. Web Sources
- [16]. J. L. Pressman and A. Wildavsky, Implementation: 3rd edn. Berkeley: University of California Press, 1984.
- [17]. D.A. Mazmanian and P.A. Sabatier, Implementation and Public Policy. Glenview: Scott, Foresman, 1983
- [18]. L.J.R. Jr. O'Toole, "Rational Choice and Policy Implementation," American Review of Public Administration, vol. 25, no. 1, pp. 43-57, 1995
- [19]. R. F. Elmore, "Backward Mapping: Implementation Research and Policy Decisions," Political Science Quarterly, vol. 94, pp. 601-616, 1979.
- [20]. Hogwood, Brian W, Gunn, and A. Lewis, Policy Analysis for the Real World. Oxford: University Press, 1984.
- [21]. Van Meter, Van Horn, and E. Carl, "The Policy Implementation Process : A Conceptual Framework," Administration and Society, vol. 6, no. 4, pp. 445-485, 2002.
- [22]. M. S. Grindle, Politics and Policy Implementation in The Third World. New Jersey: Princeton University Press, 1980.